

**PENGARUH UPAH DAN MODAL MANUSIA TERHADAP TINGKAT
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

**Ni Made Wulan Pradnyaswari¹
Ida Bagus Darsana²
Nyoman Djinar Setiawina³**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
E-mail : pradnyaswariwulan@gmail.com

ABSTRAK

Disparitas distribusi pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat berpendapatan tinggi dan golongan masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk, 1) menganalisis pengaruh upah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, 2) menganalisis modal manusia terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, 3) menganalisis pengaruh upah terhadap distribusi pendapatan, 4) menganalisis pengaruh modal manusia terhadap distribusi pendapatan, 5) menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap distribusi pendapatan, 6) mengetahui peran tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai variabel *intervening* dari pengaruh upah dan modal manusia terhadap distribusi pendapatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 72 jumlah pengamatan, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan bahwa, 1) upah secara langsung tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, 2) modal manusia secara langsung berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, 3) upah secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan, 4) modal manusia secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan, 5) tingkat partisipasi angkatan kerja secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap distribusi pendapatan, 6) tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan variabel *intervening* dari pengaruh variabel upah dan tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan variabel *intervening* modal manusia terhadap distribusi pendapatan.
Kata kunci: upah, modal manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, distribusi pendapatan

ABSTRACT

Disparity income distribution is the relative inequality of income between high-income and low-income. This study aims to, 1) analyze the effect of wages on the level of labor force participation, 2) analyze human capital on the level of labor force participation, 3) analyze the effect of wages on income distribution, 4) analyze the effect of human capital on income distribution, 5) analyze the effect labor force participation rate on income distribution, 6) knowing the role of labor force participation rate as an intervening variable. This study uses secondary data with 72 observations, analyzed using path analysis. The analysis shows that, 1) direct wages do not have significant effect and positive relationship to the level of labor force participation, 2) human capital directly significant effect but negative relationship with labor force participation levels, 3) wages directly negative and significant effect on income distribution, 4) human capital directly has positive and not significant effect on income distribution, 5) the level of labor force participation directly significant negative effect on income distribution, 6) the level of labor force participation is not intervening variable of influence of wage variables and the level Labor force participation is intervening variable of human capital on income distribution.
Keywords: wages, human capital, labor force participation rate, disparity in income

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan tingkat ketimpangan pendapatan. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat mendorong maupun menghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi (Sukirno, 2006: 426). Pertumbuhan penduduk yang melebihi pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan dengan daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali. Disparitas pendapatan merupakan inti permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan negara sedang berkembang.

Provinsi Bali yang memiliki delapan kabupaten dan satu kota setiap wilayahnya telah mengalami ketimpangan distribusi pendapatan, hal itu dikarenakan tingkat upah yang ditetapkan di setiap kabupaten/kota berbeda-beda serta modal manusia yang dimiliki di setiap wilayahnya sangat jauh berbeda. Kesenjangan pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang dapat diukur dengan gini rasio yang diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (ketidakmerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana kurva Lorenz itu berada. Ukuran gini rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan

mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila gini rasio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila gini rasio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Untuk melihat disparitas distribusi pendapatan setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (Poin)

Kabupaten/Kota	Gini Rasio				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	0,39	0,31	0,36	0,32	0,33
Tabanan	0,40	0,36	0,34	0,31	0,32
Badung	0,34	0,31	0,32	0,32	0,34
Gianyar	0,38	0,32	0,30	0,27	0,31
Klungkung	0,35	0,37	0,36	0,37	0,39
Bangli	0,33	0,38	0,35	0,30	0,31
Karangasem	0,34	0,31	0,29	0,32	0,34
Buleleng	0,39	0,34	0,34	0,31	0,34
Denpasar	0,38	0,36	0,33	0,34	0,34

Sumber: BPS provinsi Bali, 2019

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa gini rasio di Provinsi Bali tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Antara kabupaten di Bali pada tahun 2016-2018 hanya Klungkung dan Karangasem yang mengalami peningkatan gini rasio. Peningkatan yang terbesar terjadi di Kabupaten Karangasem yang tingkat ketimpangannya meningkat dari 0,29 di tahun 2016 menjadi 0,32 di tahun 2017 menjadi 0,34 di tahun 2018. Gini rasio tertinggi dari tahun 2016-2018 terdapat di Kabupaten Klungkung. Gini rasio terendah pada tahun 2016 terdapat di Kabupaten Gianyar, pada tahun 2017 terdapat di Kabupaten Bangli dan pada tahun 2018 terdapat di dua kabupaten yaitu Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli. Tabel 1 dapat

mengindikasikan bahwa adanya disparitas atau ketimpangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Teori neoklasik mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi tenaga kerja, pengangguran bertambah yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan (Abdulah, 2013). Semakin tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maka perlu adanya penambahan untuk ketersediaan lapangan pekerjaan agar dapat menyerap jumlah pekerja yang banyak. Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam suatu wilayah akan menyebabkan kesejahteraan antar masyarakat semakin rendah dan juga terhambatnya pembangunan di suatu wilayah yang kemudian akan menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin tinggi (Alfya, 2018).

Menurut Todaro dan Smith (2006: 248) ada tiga jawaban mengapa harus memerhatikan ketimpangan yang terjadi. Pertama, ketimpangan pendapatan ekstrem menimbulkan inefisiensi perekonomian. Kedua, ketimpangan pendapatan akan merusak stabilitas dan solidaritas sosial. Ketiga, ketimpangan pendapatan umumnya dipandang tidak adil.

Tujuan dalam penelitian ini adalah, (1) untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan modal manusia bidang pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Regional (UMR), modal manusia bidang pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, (3) untuk

mengetahui peran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai variabel *intervening* dari pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan modal manusia bidang pendidikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

KAJIAN PUSTAKA

Disparitas Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan merupakan ketimpangan relatif pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan gini rasio. Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur pemerataan distribusi pendapatan, salah satunya adalah indeks gini atau gini rasio. Rasio gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal.

Menurut Todaro dan Smith (2002: 257) secara sistematis rumus koefisien Gini dapat disajikan sebagai berikut

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1}) \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- KG = angka koefisien gini
- X_i = proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i
- Y_i = proporsi jumlah pendapatan tangga kumulatif dalam kelas i

Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika:

- G < 0,3 → ketimpangan rendah
- 0,3 ≤ G ≤ 0,5 → ketimpangan sedang
- G > 0,5 → ketimpangan tinggi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara

ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK merupakan angka yang menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (Mantra, 2003: 230). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dirumuskan:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Penduduk Usia Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Bila angka TPAK kecil maka diduga penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan sebagainya untuk peningkatan angkatan kerja yang berpendidikan. Angka partisipasi angkatan kerja harus ditingkatkan sebagai fungsi pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, semakin tinggi TPAK (Litzinger *et al.*, 2015).

Upah Minimum Regional (UMR)

Tingkat upah dapat berbeda tergantung dari sektor mana tenaga kerja itu berada, letak geografis usaha, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja, jenis kelamin, proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi, Proporsi keuntungan terhadap penjualan, skala organisasi, kelangkaan tenaga kerja, kekuatan serikat pekerja dan jenis jabatan. Berbagai tingkat upah tersebut terkait dengan suatu struktur tertentu (Marhaeni dan Manuati, 2004: 170). Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral, dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Upah minimum ditetapkan berdasarkan persetujuan dewan

pengupahan yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja. Tujuan dari ditetapkan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah (Sofiyana, 2017).

Modal Manusia (*Human Capital*)

Modal biasanya mengacu pada persediaan peralatan dan struktur ekonomi. Persediaan modal meliputi traktor petani, pabrik-pabrik perakitan dan papan tulis guru. Esensi dari modal adalah faktor produksi yang telah diproduksi oleh modal itu sendiri. Ada jenis modal lainnya yang sama pentingnya dengan produksi ekonomi, walaupun kurang nyata dibandingkan dengan modal bentuk fisik. Modal manusia (*human capital*) adalah akumulasi investasi yang melekat pada diri para pekerja. Jenis modal manusia yang paling penting adalah pendidikan. Seperti seluruh bentuk modal, pendidikan mewakili pengeluaran sumber daya pada suatu titik dalam satu waktu untuk meningkatkan produktivitas pada masa yang akan datang. Tidak seperti investasi dalam bentuk modal lainnya, investasi dalam pendidikan terikat pada orang tertentu dan hubungan inilah yang menjadikannya modal manusia (Mankiw dkk, 2008: 414).

Kerangka Konseptual

Upah sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, dimana jika semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan dalam pasar tenaga kerja maka semakin banyak jumlah penduduk usia kerja yang memilih masuk ke pasar tenaga kerja, maka dengan otomatis akan meningkatkan jumlah angkatan kerja dan menurunkan jumlah bukan angkatan kerja, dengan meningkatnya jumlah angkatan

kerja maka akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan dalam masyarakat, maka semakin banyak anggota keluarga yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja (Hardiyanti, 2017).

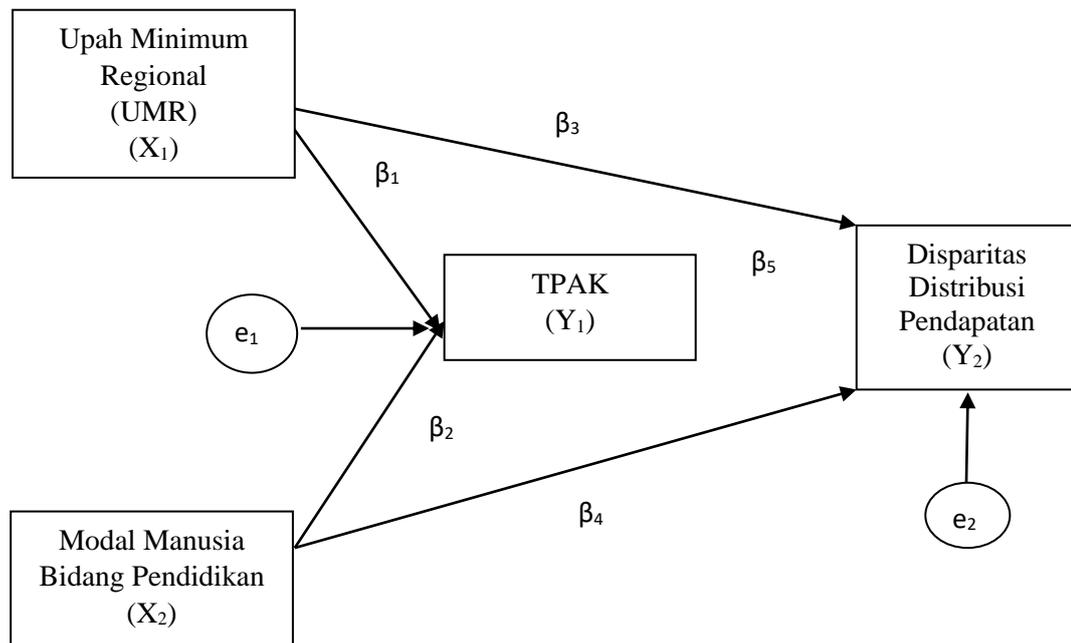
Akumulasi modal manusia (*human capital stock*) tenaga kerja merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan informasi penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan arah pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia dan lapangan kerja di masa yang akan datang. Semakin kecil jumlah angkatan kerja artinya banyak penduduk yang bersekolah sehingga TPAK rendah. Semakin banyak peluang yang disediakan untuk bekerja dan nilai waktunya semakin mahal dapat menggambarkan tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang (Aminanda dan Masbar, 2018).

Teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Upah minimum menyebabkan non pasar berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja yang meningkatkan harga tenaga kerja, dengan meningkatnya harga tenaga kerja upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan tenaga kerja dan sebahagian pekerja akan menjadi pengangguran. Di sisi lain, institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum mengurangi ketimpangan. Negara dengan upah minimum yang lebih tinggi memiliki level ketimpangan pendapatan keluarga yang lebih rendah dan bahwa upah minimum negara mengurangi ketimpangan pendapatan keluarga. Upah minimum yang

ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi akan menurunkan ketimpangan upah secara substansial, dengan asumsi dilakukan untuk menahan laju ketimpangan (Nurmalisa Sungkar dkk., 2015).

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan berhubungan terbalik (negatif) dengan disparitas pendapatan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan menurunkan kesenjangan antar daerah dengan asumsi bahwa semakin banyak penduduk yang berpendidikan rendah, maka kesenjangan pendapatan antar daerah cenderung tinggi tetapi jika semakin banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah akan semakin turun. Apabila golongan miskin tidak mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan dan tinggi karena alasan-alasan keuangan lainnya, maka sistem pendidikan justru akan mempertahankan atau bahkan memperburuk ketidakmerataan di negara-negara dunia ketiga (Syamsidar, 2017).

Semakin meningkatnya partisipasi dari angkatan kerja berarti ada kenaikan kegiatan ekonomi dan tingkat kemakmuran, sehingga ketimpangan mengalami penurunan. Jumlah angkatan kerja mempunyai pengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Berarti semakin meningkat angkatan kerja akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi dengan dibukanya lapangan kerja baru tentu akan menyerap tenaga kerja baru sehingga jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan (Yeniwati dan Zulva, 2012).



Gambar 1. Model Analisis Jalur

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2017: 23).

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi nonparticipant, yaitu observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2017: 232). Memperoleh

data dengan metode ini dapat dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan serta mempelajari uraian-uraian dari buku-buku, jurnal-jurnal, situs internet, skripsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh dasar teoritis dan acuan untuk memperoleh data.

Jumlah Pengamatan

Jumlah pengamatan dalam penelitian ini ada di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2011 hingga 2018 (8 tahun) maka besarnya ukuran sampel adalah $9 \times 8 = 72$ pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series dan cross section*.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah perhitungan minimum, maximum, mean dan standar deviasi (Sugyiono, 2017: 232).

Analisis Jalur

Analisis jalur (*path analysis*) merupakan perluasan penerapan analisis regresi linier berganda untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel (model kasual) yang telah ditetapkan sebelumnya. Model ini dipertimbangkan untuk digunakan dalam suatu penelitian apabila hubungan yang dianalisis merupakan hubungan sebab akibat dengan model yang kompleks, dalam analisis jalur terdapat

suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel mediasi atau *intervening*. Adanya hubungan yang kompleks tersebut membutuhkan alat analisis jalur akan dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel (Utama, 2016: 159).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugyiono, 2017: 232). hasil statistik deskriptif dalam penelitian dapat dilihat pada table 1 berikut.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif UMR, Modal Manusia, TPAK dan Disparitas Distribusi Pendapatan

	UMR	Rata-Rata Lama Sekolah	TPAK	Gini Rasio
N	72	72	72	72
Minimum	893.000	4,60	69,18	0,27
Maximum	2.499.581	11,16	88,06	0,42
Mean	1.601.109,46	7,7779	76,8025	0,3410
Std. Deviaton	448.287,277	1,63848	4,61502	0,03145

Sumber: Hasil Olahan Data, 2019

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel UMR (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 893.000 ribu rupiah dan nilai maximum sebesar 2.499.581 juta rupiah dengan rata-rata 1.601.109,46 juta rupiah dan standar deviasi sebesar 448.287,277 ribu rupiah. variabel modal manusia bidang pendidikan (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 4,60 tahun dan nilai maximum sebesar 11,16 tahun dengan rata-rata 7,7779 tahun dan standar deviasi sebesar 1,63848 tahun.

TPAK (Y_1) memiliki nilai minimum sebesar 69,18 persen dan nilai maximum sebesar 88,06 persen dengan rata-rata 76,8025 persen dan standar deviasi sebesar 4,61502 persen. variabel disparitas distribusi pendapatan (Y_2) memiliki nilai minimum sebesar 0,27 poin dan nilai maximum sebesar 0,42 poin dengan rata-rata 0,3410 poin dan standar deviasi sebesar 0,03145 poin.

Pengaruh UMR dan Modal Manusia Bidang Pendidikan terhadap TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

1) Persamaan regresi sub struktural I:

Pengujian hubungan substruktural I dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel UMR dan modal manusia bidang pendidikan terhadap TPAK kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_1 = 0,131X_1 - 0,713X_2 + e_1$$

$$S_b = (0,967) \quad (0,265) \quad R^2 = 0,461$$

$$t = (1,398) \quad (-7,583) \quad F = 29,543$$

$$\text{sig} = (0,167) \quad (0,000)$$

$$F_{\text{tabel}} = (k-1) (n-k) \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

k = Jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel penelitian

$$F_{\text{tabel}} = (k-1) (n-k)$$

$$F_{\text{tabel}} = (2-1) (72-2)$$

$$F_{\text{tabel}} = (1)(70)$$

$$F_{\text{tabel}} = 3,98$$

2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural I

Tabel 2. Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural I

Regresi	Koef. Reg Standar	t hitung	P. Value/ sig.	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,131	1,398	0,167	Tidak Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	-0,713	-7,583	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil Olahan Data, 2019

Keterangan:

X_1 = Upah Minimum Regional (UMR)

X_2 = modal manusia bidang pendidikan

Y_1 =Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan persamaan regresi struktural I, F_{hitung} menunjukkan angka sebesar 29,543 dengan F_{tabel} sebesar 3,98. F_{hitung} 29,543 > 3,98, artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel UMR, modal manusia bidang pendidikan dan TPAK sudah layak (*fit*).

Pengaruh UMR, Modal Manusia Bidang Pendidikan dan TPAK terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

1) Persamaan regresi substruktural II

Pengujian hubungan substruktural II dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel UMR, modal manusia bidang pendidikan dan TPAK terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_2 = -0,242X_1 + 0,005X_2 - 0,378Y_1 + e_2$$

$$S_b = (0,008) \quad (0,003) \quad (0,001) \quad R^2 = 0,183$$

$$t = (-2,044) \quad (0,033) \quad (-2,534) \quad F = 5,081$$

$$\text{sig} = (0,045) \quad (0,973) \quad (0,014)$$

$$F_{tabel} = (k-1)(n-k) \dots\dots\dots (4)$$

k = Jumlah variabel bebas
 n = jumlah sampel penelitian

$$F_{\text{tabel}} = (k-1) (n-k)$$

$$F_{\text{tabel}} = (2-1) (72-2)$$

$$F_{\text{tabel}} = (1)(70)$$

$$F_{\text{tabel}} = 3,98$$

2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural II

Tabel 3. Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural II

Regresi	Koef. Reg. Standar	t hitung	P. Value/sig	Keterangan
X ₁ → Y ₂	-0,242	-2,044	0,045	Signifikan
X ₂ → Y ₂	0,005	0,033	0,973	Tidak Signifikan
Y ₁ → Y ₂	-0,378	-2,534	0,014	Signifikan

Sumber: Hasil Olahan Data, 2019

Keterangan:

- X₁ = Upah Minimum Regional (UMR)
- X₂ = modal manusia bidang pendidikan
- Y₁ =Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- Y₂ =disparitas distribusi pendapatan

Berdasarkan persamaan regresi struktural II, F_{hitung} menunjukkan angka sebesar 5,081 dengan F_{tabel} sebesar 3,98 . F_{hitung} 5,081 > 3,98, artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel UMR, modal manusia bidang pendidikan, TPAK dan disparitas distribusi pendapatan sudah layak (*fit*).

Nilai kekeliruan Taksiran Standar (*Standard Error of Estimate*)

Mengetahu nilai e₁ yang menunjukkan jumlah variance variabel TPAK yang tidak dijelaskan oleh (UMR) dan modal manusia bidang pendidikan dihitung menggunakan rumus:

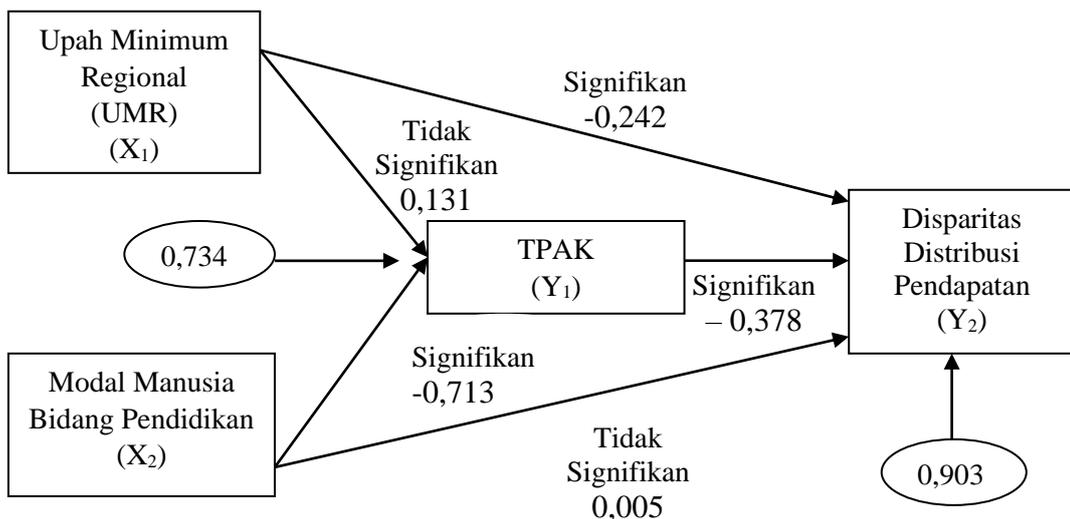
$$e_1 = \sqrt{(1 - R^2)} \dots \dots \dots (5)$$

$$e_1 = \sqrt{(1 - 0,461)} = 0,734$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan variance variabel disparitas pendapatan yang dijelaskan oleh variabel oleh (UMR), modal manusia bidang pendidikan dan TPAK dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{(1 - R^2)} \dots \dots \dots (6)$$

$$e_2 = \sqrt{(1 - 0,183)} = 0,903$$



Gambar 2. Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel

Nilai Koefisien Determinasi Total

Memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$$R^2m = 1 - (e_1)^2(e_2)^2 \dots \dots \dots (7)$$

$$R^2m = 1 - (0,734)^2(0,903)^2$$

$$R^2m = 0,562$$

Keterangan:

R^2 : koefisien determinasi

e_1, e_2 : nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil hitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 56,2 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 56,2 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 43,8 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pengaruh Langsung

1) Pengaruh langsung Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,131 dengan sig 0,167 >0,05 maka H_0 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMR secara langsung tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap TPAK kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hardiyanti (2017) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif tidak signifikan antara variabel UMR terhadap TPAK. Hasil penelitian Izzah Niddaul (2015) menyatakan bahwa UMR berpengaruh positif terhadap TPAK. Hal ini disebabkan oleh peningkatan upah menjadi daya tarik tersendiri bagi seseorang untuk menjadi angkatan kerja. Seseorang berpendapat apabila upah meningkat maka tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat. Peningkatan upah minimum sebenarnya dapat merangsang orang untuk masuk di pasar tenaga kerja, sehingga jumlah angkatan kerja semakin meningkat dan dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah TPAK.

Penyebab UMR tidak signifikan terhadap TPAK adalah peningkatan upah menjadi beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan cenderung mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Hal ini menyebabkan peningkatan upah tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Masyarakat telah mengetahui bahwa peningkatan upah tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja, justru peningkatan upah akan berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja, karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayar biaya produksi yang relatif tinggi.

2) Pengaruh langsung modal manusia bidang pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar -0,713 dengan sig 0,000 <0,05 maka H_1 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modal manusia bidang pendidikan secara langsung berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan negatif terhadap TPAK kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hubungan negatif signifikan antara variabel modal manusia bidang pendidikan terhadap TPAK sesuai dengan penelitian Borgan *dkk* (2018) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap TPAK. Hasil penelitian Oktavia dan Tisnawati (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap partisipasi angkatan kerja. Hubungan negatif antara modal manusia bidang pendidikan terhadap TPAK disebabkan oleh faktor yang tidak menunjang diantaranya strata pendidikan yang tidak sesuai harapan perusahaan atau instansi yang ada dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala seperti

perkembangan jumlah angkatan kerja namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup dan membuat partisipasi angkatan kerja menurun.

3) Pengaruh langsung Upah Minimum Regional (UMR) terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar -0,242 dengan sig 0,045 < 0,05 maka H_1 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMR secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Musfidar (2012) yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara variabel Upah Minimum Regional (UMR) terhadap disparitas distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nangarumba (2015) menyatakan UMR berpengaruh negatif signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan bahwa hal ini dikarenakan program pemerintah yang memang sengaja menetapkan tingkat upah yang tidak jauh berbeda agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan di daerah-daerah, program ini akan mengurangi ketimpangan penghasilan pekerja yang tentunya juga akan mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat.

4) Pengaruh langsung modal manusia bidang pendidikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar 0,005 dengan sig 0,973 > 0,05 maka H_0 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modal manusia bidang pendidikan secara langsung tidak berpengaruh negatif atau berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan

kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Fithrian *et al* (2015) yang menyatakan bahwa modal manusia bidang pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan. Variabel tingkat pendidikan yang dapat diukur dengan rata-rata lama sekolah sendiri ternyata berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan hal ini sesuai dengan kualitas mutu pendidikan masih rendah walaupun alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan sangat besar dan setiap tahunnya terus meningkat.

Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap ketimpangan pendapatan tidak signifikan sesuai dengan penelitian Ibnu dan Husna (2019). Hal ini dikarenakan perubahan pada rata-rata lama sekolah tidak menyebabkan perubahan apapun pada ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan terjadinya perpindahan penduduk yang memiliki pendidikan dan keahlian tinggi ke wilayah lain dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, alasan utama dari efek buruk pendidikan formal atas distribusi pendapatan adalah adanya korelasi yang positif antara tingkat pendidikan seseorang dengan penghasilannya seumur hidup.

5) Pengaruh langsung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficients Beta* sebesar -0,378 dengan sig 0,014 < 0,05 maka H₁ diterima dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hubungan

negatif signifikan antara variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap disparitas distribusi pendapatan sesuai dengan penelitian Yewati dan Zulva, (2012). Jumlah angkatan kerja mempunyai pengaruh secara negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Berarti semakin meningkat angkatan kerja akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi dengan dibukanya lapangan kerja baru tentu akan menyerap tenaga kerja baru sehingga jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan. Jumlah tenaga kerja juga mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah. Menurut Kuznet tentang hubungan jangka panjang pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan. Hipotesisnya mengikuti pola huruf U terbalik, dimana pada awal proses pembangunan, ketimpangan pembangunan akan cenderung meningkat tetapi apabila pembangunan berjalan terus menerus dan mobilitas modal dan tenaga kerja lancar barulah ketimpangan pembangunan regional akan mulai menurun, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan dapat dikurangi dengan jalan meningkatkan pemerataan penyerapan tenaga kerja (Todaro dan Smith, 2003: 222).

Uji Sobel

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai variabel *intervening* dari pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Untuk mengetahui (TPAK) sebagai variabel *intervening* dari pengaruh UMR terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1^2} + \beta_1^2 S_{\beta_5^2}} \dots\dots\dots (8)$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(-0,003)^2(0,967)^2 + (1,352)^2 (0,001)^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 0,003$$

Berdasarkan perhitungan rumus $S_{\beta_1\beta_5}$ maka untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai z dari koefisien $S_{\beta_1\beta_5}$ dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}} \dots\dots\dots (9)$$

$$Z = \frac{(1,352) (-0,003)}{0,003}$$

$$Z = -1,33$$

Oleh karena nilai Z hitung sebesar $-1,33 < 1,96$ Artinya TPAK bukan variabel *intervening* UMR terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali atau dengan kata lain UMR tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap disparitas distribusi pendapatan melalui TPAK.

Besarnya pengaruh tidak langsung antara variabel UMR terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui TPAK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_1 \longrightarrow Y_1 \longrightarrow Y_2 &= (a_1 \times b) \dots\dots\dots (10) \\ &= (1,352 \times -0,003) \\ &= -0,004 \end{aligned}$$

Nilai sebesar -0,004 mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung UMR terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui TPAK adalah sebesar -0,004 persen.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai variabel *intervening* dari pengaruh modal manusia bidang pendidikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Untuk mengetahui TPAK sebagai variabel *intervening* dari pengaruh modal manusia bidang pendidikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2^2} + \beta_2^2 S_{\beta_5^2}} \dots\dots\dots (11)$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{(-0,003)^2 (0,265)^2 + (-2,007)^2 (0,001)^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = 0,002$$

Berdasarkan perhitungan rumus $S_{\beta_2\beta_5}$ maka untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai z dari koefisien $S_{\beta_2\beta_5}$ dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}} \dots\dots\dots (12)$$

$$Z = \frac{(-2,007)(-0,003)}{0,002}$$

$$Z = 3$$

Oleh karena Z hitung sebesar 3 > 1,96 Artinya TPAK merupakan variabel *intervening* modal manusia bidang pendidikan terhadap disparitas pendapatan kabupaten kota di provinsi Bali atau dengan kata lain modal manusia bidang pendidikan berpengaruh secara tidak langsung terhadap disparitas pendapatan melalui TPAK

Besarnya pengaruh tidak langsung antara variabel modal manusia bidang pendidikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui TPAK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2 &= (a_2 \times b) \dots\dots\dots(13) \\ &= (-2,007 \times -0,003) \\ &= 0,006 \end{aligned}$$

Nilai sebesar 0,006 mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung modal manusia bidang pendidikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui TPAK adalah sebesar 0,006 persen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Upah Minimum Regional (UMR) secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan modal manusia bidang pendidikan secara langsung berpengaruh signifikan namun memiliki hubungan negatif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Upah Minimum Regional (UMR) secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Modal manusia bidang pendidikan secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

(TPAK) bukan sebagai variabel *intervening* dari variabel Upah Minimum Regional (UMR) dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) sebagai variabel *intervening* dari pengaruh modal manusia bidang pendidikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Pemerintah provinsi Bali hendaknya meningkatkan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini dikarenakan meskipun data angka rata-rata lama sekolah menunjukkan dari tahun ke tahun terus meningkat namun belum mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintah. Program-program bantuan dana pendidikan dari pemerintah harus tepat sasaran agar daerah-daerah yang jauh dari pusat kota yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan dapat menikmati pendidikan tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.

Pemerintah perlu melakukan pemerataan agar tidak terjadinya ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali harus menyeimbangkan dan memberikan pelatihan serta peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memprioritaskan pemerataan dalam aspek distribusi pendapatan serta melakukan pemerataan dari segi tingkat upah agar tidak terjadinya ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali, dengan adanya perbedaan upah dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah.

REFRENSI

- Abbas Tarmizi. (2010). Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal E-Mabis Fe-Unimal*, Volume 11, Nomor 3.
- Aminanda Yulia & Masbar Raja.(2018). Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaSubsektor Pertanian di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*Vol.3 No.4 November 2018: 794-806. ISSN.2549-8363.
- Alfya Rahma Ellza.(2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016.Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta.*Skripsi*.
- Borgan Bonerri Kadek, Een Novritha Walewangko &Steeva Y.L. Tumangkeng. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Manado.*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 18 No. 01.
- Fitriani Nurul. (2017). Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. *Skripsi*.
- Hardiyanti Hatta Siti.(2017). Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Kota Makasar.*Skripsi*.
- Ibnu Fatsabit Muhammad & Husna Leila Yusran.(2019). Pengaruh Keterbukaan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.*Media Ekonomi*. Vol 27 No. 1:71-84. Issn: 2442-9686 (Online). Issn: 0853-3970 (Print)
- Izzah Niddaul.(2015). Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jakarta 2004 -2013. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. ISSN 2085-1162.
- Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*. Vol 27 No. 1: 71-84. Issn : 2442-9686 (Online). Issn : 0853-3970 (Print)
- Kristyanto Visi Saujaningati &Kaluge David. (2018).*Peningkatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Investasi Modal Manusia*, Vol 11. No 2, Hal 182-189. *JEKT*.
- Litzinger, Ph.D Patrick J, John H. Dunn, Jr., MBA.(2015). The Labor Force Participation Rate a Rexamination of The Determinants of Its Decline. *The Journal of Applied Business Research*. Volume 31, Number 6.

- Mankiw N Gregory, Euston Quah & Peter Wilson.(2008).*Pengantar Ekonomi Makro*. Volume 1. Penerbit Salemba Empat.
- Mantra Ida Bagus. (2003). *Demografi Umum*. Yogyakarta, Awal. Edisi Kedua. *Millenium III*.
- Marhaeni A.A.I.N & Manuati I.G.A.(2004). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Fakultas Ekonomi Universita Udayana.
- Musfidar Ma'mun. (2012). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010". *Skripsi*. Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Hasanuddin. Makassar. *Skripsi*.
- Nangarumba, Muara. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *JESP-Vol. 7*, No 2 Nopember 2015.
- Nurmalisa Sungkar, Sari & Nazamuddin. Muhammad Nasir. (2015). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Volume 3, No.2. Issn 2302-0172. Pp. 40- 53
- Oktavia Utami Dewi I Gusti Ayu Made & Ni Made Tisnawati.(2017). Tingkat Partisipasi Kerja dan Karakteristik Sosial Ekonomi Pedagang Perempuan di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli (Studi Kasus di Pasar Kidul). *E-Jurnal EP Unud*. 6 [7]: 1273-1301 ISSN: 2303-0178.
- Sukirno Sadono. (2006). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi kedua. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sofiyana Maharani Arizka. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Kalimantan. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Skripsi*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsidar.(2017). Pengaruh Modal Fisik dan Modal Manusia Terhadap Disparitas Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2014, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. *Skripsi*.
- Todaro, Michael, P & Smith Stephen. C.(2002). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

,2003. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

,2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Utama Made Suyana. (2016). *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Cv. Sastra Utama.

Yeniwati & Zulva Riani Novya. (2012). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan di Pulau Sumatera*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. *Penelitian*.